

BAB II

PENDIRIAN MAJELIS INDONESIA-MALAYSIA

2.1 Kisah Awal Kerjasama Antara Indonesia dan Malaysia

Bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa *lingua franca* (bahasa penghubung) yang digunakan dikawasan Asia Tenggara selama berabad-abad sejak zaman dulu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah peninggalan sejarah yang berupa naskah, prasasti, serta surat diwilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu akhirnya diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa resmi Indonesia sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia pada tahun 1957, sedangkan di negara Brunei Darussalam bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan pada tahun 1959. Jumlah para penutur bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kurang lebih mencapai 230 juta yang tersebar diberbagai negara, seperti di Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand selatan, Singapura, serta di beberapa daerah bagian di Filipina.²⁹

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam kehidupan dilingkungan Asia Tenggara bisa dikatakan memiliki perpaduan budaya yang hampir sama, yaitu melayu. Hal tersebut Nampak dari penggunaan bahasa Melayu yang digunakan oleh rakyat di Malaysia dan juga bahasa Indonesia yang

²⁹ Hasan Alwi, *Sosok Pokok Tokoh Mabbim*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 6.

digunakan oleh rakyat Indonesia. Peranan dan kedudukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa antar-bangsa dan salah satu bahasa dunia sudah menjadi sebuah fakta sejak zaman dulu di dalam jejak perjalanan sejarah. Bahasa Melayu yang biasa digunakan di daratan Asia Tenggara memiliki perbedaan dengan bahasa Indonesia, meskipun asalnya memang sama serumpun. Perbedaan tersebut terletak dalam segi istilah, kata, ejaan, serta struktur. Perbedaan itu disebabkan oleh bedanya geografi, sejarah serta sosiolinguistik.³⁰

Hubungan antara Indonesia serta Malaysia memiliki cakupan yang sangat luas dan berkaitan dengan kepentingan dari masing-masing negara. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan sejarah, kekerabatan serta budaya yang bergitu erat.³¹ Pada umumnya bahasa Melayu yang sudah tersebar sangat luas, tidak bisa menutup kemungkinan terdapatnya perbedaan antara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang berasal dari negara-negara yang menggunakannya. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena berbagai hal dikarenakan banyak tersebaranya para penutur. Maka dari itu, solusi untuk bisa mengurangi perbedaan tersebut, diperlukan adanya sebuah kerjasama diantara negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu, karena pada kenyataannya bahasa itu berfungsi sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.

Bahasa diperlukan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Melalui bahasa seseorang bisa menyampaikan gagasan, perasaan, pendapat serta dapat membantu mendapatkan informasi dan menambah ilmu pengetahuan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

³¹ Shylvia Windary, *Kontribusi Non-Government Organization (NGO) dalam Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah. Jurnal Transborders* Vol. 5, No. 2 (2022): 115-128, hlm. 115.

Peranan bahasa dalam kehidupan manusia tentu sangat besar sekali, karena secara fungsi hakiki, bahasa itu menjadi sebuah alat kerjasama untuk berkomunikasi. Perkembangan bahasa di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi 3 periode, diantaranya periode sebelum Sumpah Pemuda, era Sumpah Pemuda sampai kemerdekaan RI, serta periode pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Bahasa Indonesia adalah media komunikasi serta unsur yang utama bagi masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pemersatu, karena selalu digunakan sehari-hari dan merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang bisa digunakan dalam berbagai acara atau keperluan.³² Adanya kesadaran akan persamaan asal serta sejarah antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia menjadi sebuah pemicu utama yang memunculkan kesepahaman antara para penutur yang saat itu diwakili oleh pakar bahasa serta pemerintah dari masing-masing negara untuk membangun sebuah kebersamaan dalam mengembangkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.³³

Secara resmi Indonesia serta Malaysia menjalin hubungan pada tahun 1957, dimana pada saat itu negara Malaysia masih dikenal dengan sebutan Tanah Melayu yang baru saja mendapatkan kemerdekaan dari pihak Inggris.³⁴ Pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang membuka serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Akan tetapi hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia penuh dengan dinamika pasang-surut dalam

³² Pinky Annisa, *Pengaruh Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*. Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 2.

³³ Mahsun, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu: Perkembangan Hubungan dan Masa depannya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2013, hlm. 16.

³⁴ Maksun Ali, *Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

tiap era pemerintah masing-masing. Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia sebenarnya sudah terjalin sebelum kemerdekaan, hal tersebut dikarenakan adanya faktor ikatan nasionalisme yang kuat diantara para pemuda dua bangsa ini yang ingin melawan para penjajah.

Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia diantaranya dilakukan dalam bidang ekonomi, keamanan, politik, Pendidikan, penerbitan, militer, penyiaran, kebahasaan serta sosiobudaya.³⁵ Salah satunya kerjasama dalam bahasa antara pihak Indonesia dan juga Malaysia sudah terbentuk sejak tahun 1959. Dalam perjalanan sejarahnya, kerjasama tersebut sempat terhenti dikarenakan terjadinya konfrontasi antara pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia pada saat itu. Meskipun pada akhirnya hubungan kedua negara tersebut kembali membaik setelah berakhirnya konfrontasi.³⁶ Dalam konteks hubungan Indonesia serta Malaysia, banyak hal yang menjadi penentu sikap politik diantara kedua negara ini.

Mulai dari tahun 1963 sampai tahun 1966, negara Indonesia dan juga Malaysia mempunyai arah haluan yang beda, dimana pada saat itu Indonesia cenderung dengan blok komunis sedangkan pihak Malaysia dengan blok kapital, pada akhirnya membuat kedua negara ini mengalami berbagai ketegangan. Pada masa pemerintahan Ir. Soekarno tepatnya tahun 1957, hubungan kerjasama antara pihak Indonesia dan Malaysia mulai terjalin. Sejak dimulainya hubungan sampai

³⁵ Nik Mohamed Nik Mohd. Salleh, "*Hubungan Malaysia-Indonesia di Era pasca Konfrontasi*", dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 37.

³⁶ Wiwiek Dwi Astuti, *Sikap Bahasa Mahasiswa dan Dosen Terhadap Istilah Terjemahan dan Istilah Serapan Bidang Ekonomi Hasil MABBIM*. *Humaniora* Vol.19, No. 1 (2007): 62-72, hlm. 62.

digantikannya Ir. Soekarno sebagai presiden, hubungan antara negara Indonesia serta Malaysia banyak diwarnai dengan berbagai macam konflik kecil. Konflik tersebut menjadi lebih buruk lagi pada saat memasuki 4 tahun terakhir sebelum Ir. Soekarno tidak menjabat lagi sebagai presiden Indonesia. Lalu pada tahun 1963 hubungan buruk itu terus berkepanjangan, khususnya pada saat akan dibentuknya negara Federasi Malaysia yang saat itu akan menyatukan bagian Sabah serta Serawak menjadi bagian dari Tanah Melayu.

Indonesia pada akhirnya menyatakan sebuah aksi konfrontasi kepada Malaysia tanggal 20 Januari tahun 1963. Selama pengumuman terjadinya konfrontasi terhadap Malaysia, Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Dr. Subandrio beranggapan bahwa, konfrontasi melawan negara Malaysia itu dikarenakan Malaysia adalah seorang pengikut neo-kolonialisme serta neo-imperialisme. Indonesia saat itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada tanggal 16 September tahun 1963 yang bersamaan dengan tanggal berdirinya negara Malaysia.³⁷ Lalu pada 17 September tahun 1963, Malaysia juga memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia serta Filipina. Sebelum berakhirnya perselisihan ini, banyak upaya-upaya diplomasi yang pernah dilakukan namun mengalami kegagalan, seperti diadakannya Konferensi Bangkok serta Konferensi Tingkat Tinggi Tokyo yang berlangsung tanggal 20-21 Juni tahun 1964. Selain itu, disertakan juga upaya untuk menyelenggarakan organisasi daerah yang meliputi Malaysia, Indonesia, serta Filipina di Maphilindo

³⁷ Rohani Abdul Ghani & Zulhilmi Paidi, *Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun*. Malaysia, 2010, hlm. 236.

namun tetap mengalami kegagalan. Seiring berjalannya waktu berbagai ketegangan terus berlanjut, puncaknya pada saat Ir. Soekarno mencoba untuk membuat negara Malaysia terprovokasi dengan cara mengancam akan melakukan berbagai upaya untuk bisa menggagalkan pembentukan Negara Federasi Malaysia saat itu.

Hubungan diantara kedua negara kemudian diperparah lagi dengan terjadinya aksi konfrontasi oleh Ir. Soekarno terhadap negara Malaysia dengan keluarnya sebuah slogan yang bertuliskan “Ganyang Malaysia”.³⁸ Hingga pada akhirnya menjelang pertengahan tahun 1965 yang pada saat itu perpolitikan di Indonesia tengah menunjukkan situasi yang semakin tidak menentu, karena semakin menonjolnya pengaruh dari PKI serta oposisi. Klimaks terhadap konflik politik internal Indonesia disebabkan oleh Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Situasi ini secara tidak langsung memberikan sebuah peluang baru bagi pemerintah Malaysia untuk melakukan berbagai upaya yang lebih kuat lagi agar bisa mengakhiri konfrontasi. Malaysia saat itu sudah melakukan kontak rahasia dengan para pemimpin baru di Indonesia, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk negosiasi untuk penyelesaian damai. Kemudian langkah tersebut akhirnya menunjukkan dampak yang positif, pada saat Adam Malik yang disusul oleh sekelompok pemimpin militer Indonesia sudah setuju terkait permasalahan tersebut. Sesudah berbagai upaya dilakukan dan yang terakhir adalah Perjanjian

³⁸ Maksum Ali, *Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017, hlm. 14-16.

Bangkok atau Perjanjian Pemulihan Persahabatan telah disetujui, maka adanya perjanjian tersebut sudah menandai berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Berakhirnya konfrontasi tersebut berhasil memulihkan kembali hubungan yang pernah rusak selama kurang lebih tiga tahun.

Pada saat Jenderal Soeharto menjadi presiden Indonesia serta Adam Malik dilantik menjadi Menteri Luar negerinya, maka berbagai upaya untuk bisa memulihkan kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia terus dilancarkan. Tanggal 4 April tahun 1966, Adam Malik menginginkan konfrontasi diselesaikan dan diakhiri secepatnya. Kemudian pada bulan April tahun 1966 Soeharto melalui para pegawainya sudah menghubungi pihak Malaysia untuk menyelesaikan konfrontasi sesegara mungkin. Untungnya hal tersebut membuahkan hasil, pada saat itu diatur sebuah pertemuan yang sulit antara Ali Moertopo (pihak Indonesia) dengan Ghazali Shafie (pihak Malaysia) yang berlangsung pada tanggal 23-24 April tahun 1966 di Bangkok. Selanjutnya disertai pula dengan perundingan yang dilakukan di Bangkok pada tanggal 30 April 1966 oleh Adam Malik dengan Ghazali Shafie. Lalu pada tanggal 27 Mei tahun 1966 pihak Indonesia yang terdiri dari 20 pegawai tentara yang ketuanya adalah Laksamana Muda Lout OB Syaaf akhirnya sampai di Kuala Lumpur (Malaysia).

Tanggal 30 Mei tahun 1966 dilakukan Persidangan Damai di Bangkok untuk mengakhiri konfrontasi. Pihak Malaysia saat itu diwakili oleh Perdana Menteriya yaitu Tun Abdul Razak, sedangkan pihak Indonesia diwakili oleh Adam Malik (Menteri Luar Negeri). Kemudian pada tanggal 11 Agustus tahun

1966 menjadi hari yang bersejarah bagi kedua negara, karena pada hari tersebut dilakukannya majelis penandatanganan Perjanjian Damai antara Indonesia dengan Malaysia di Ruang Pancasila, Jakarta. Dengan ditandatanganinya persetujuan damai tersebut menandai berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan juga Malaysia yang sudah berlangsung selama 33 bulan. Pemulihan kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia sangat disambut baik oleh rakyat dari kedua negara tersebut. Pemulihan hubungan ini juga diharapkan dapat lebih mengeratkan hubungan antara keduanya demi untuk kepentingan bersama serta kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.³⁹

Pada 31 Agustus tahun 1967, Kantor Penghubung Indonesia yang ada di Kuala Lumpur sudah melaksanakan semua misi diplomatik diantara kedua negara (Malaysia dan Indonesia). Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemulihan Persahabatan tersebut, maka munculah paradigma baru yakni memikirkan berbagai kebutuhan hubungan bilateral yang lebih erat lagi dan konteksnya lebih luas yaitu upaya menciptakan hubungan regional diantara negara-negara yang ada dikawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan diperlukannya kolaborasi antar negara yang lebih luas lagi maka ditetapkanlah ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) yang didirikan pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Pemulihan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia telah memberikan banyak arti dalam melengkapi hubungan kekerabatan diantara keduanya.

³⁹ Nik Mohamed Nik Mohd. Salleh, “*Hubungan Malaysia-Indonesia di Era pasca Konfrontasi*”, dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 34-36.

Indonesia akhirnya kembali menjadi kontributor perkembangan Pendidikan di Malaysia seperti sebelumnya dimana belum meletusnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga dilakukan program yang mempersiapkan para dosen, pelatihan guru, pertukaran mahasiswa, dalam Institusi Pendidikan Tinggi antara Malaysia dan juga Indonesia yang sudah ada sejak awal tahun 1970. Perwujudan paling penting dalam kolaborasi ini yaitu keterlibatan Indonesia dalam upaya mendirikan Universitas Nasional Malaysia (UKM) tahun 1970. Upaya perintisan kerjasama dengan Indonesia dalam mendirikan universitas itu sekaligus menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar di negara Malaysia ini dimulai oleh Datuk Abdul Rahman Yaakob yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pelajaran.⁴⁰ Kerjasama dalam bidang pendidikan ini diwujudkan dengan agenda mengirimkan tenaga pengajar Indonesia ke negara Malaysia. Kehadiran tenaga pengajar dari Indonesia pada tahun 1970-an ini sangat berpengaruh besar terhadap pembaruan di Malaysia, khususnya dalam pengembangan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi serta dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama pada tiap-tiap sekolah yang ada di Malaysia.

Pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia ke Malaysia sebetulnya terbagi menjadi 3 golongan (pertama, tenaga pengajar yang datang sendiri, mereka datang melalui sebuah jaringan dengan cara melamar hingga akhirnya berhasil diterima dan menempati jabatan yang kosong saat itu di UTM atau ITM yang memang kebetulan sedang membutuhkan tenaga pengajar sesudah tahun 1969.⁴¹

⁴⁰ Rohani Abdul Ghani & Zulhilmi Paidi, *Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun*. Malaysia, 2010, hlm. 238.

⁴¹ Dato' haji Omar bin Moh. Hasyim, "Sumbangan Tenaga Pengajar Indonesia dalam Bidang Sains dan Matematik di Sekolah-sekolah dan Intitusi Pengajian Tinggi di Malaysia" dalam Musni Umar

Kedua, tenaga pengajar yang sudah dilibatkan dalam jaringan kampusnya masing-masing. Adanya sebuah kerjasama antara UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia) dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti ITB dan UGM. Ketiga, tenaga pengajar yang direkrut melalui sebuah program yang dinamakan “*Government to Government*” antara pihak Indonesia dan pihak Malaysia. Biasanya tenaga pengajar yang terlibat dalam program ini merupakan guru yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk dikirimkan ke Malaysia).

Bahasa Melayu memiliki arti penting dalam bidang kebahasaan guna untuk kelancaran komunikasi, perdagangan, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya atau teknologi antara Indonesia dan Malaysia, hal tersebutlah yang menjadi langkah awal untuk memulai agenda kerjasama dalam bidang kebahasaan. Sejak pertengahan tahun 1950-an kedua negara telah menyadari pentingnya penguatan bahasa karena bahasa Melayu atau bahasa Indonesia adalah bahasa yang diturunkan dari rumpun yang sama. Bulan November tahun 1955, di negara Malaysia khususnya Persekutuan Bahasa Melayu dari Universitas Malaya sudah membentuk suatu jawatan kuasa kecil yang pada saat itu bertugas mempelajari terkait tata cara penyesuaian bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Agenda tersebut dianggap penting untuk dilancarkan sesudah terlihatnya perkembangan bahasa Indonesia yang dinilai telah berhasil dan patut dicontoh oleh negara Malaysia. Agenda tersebut dipandang sebagai upaya untuk bisa memperkecil

dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 103-104.

perselisihan serta perbedaan diantara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah langkah awal bagi Malaysia dalam upaya pengembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.⁴²

Terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam Persekutuan Bahasa Melayu tersebut diantaranya ada Yang dipertuan Persekutuan Bahasa Melayu yaitu Lokman bin Musa, Tuan Hj Zainal Abidin bin Ahmad (ketua), Sharifah Azzah, Sallehudin bin Muhammad, Y.M Ungku Abdul Aziz, dan Abdul Aziz bin Mohd. Yassin (pengurus), Zainal Abidin, Ismail bin Muhammad (ahli) dll yang sangat aktif dalam merealisasikan misi mengembangkan bahasa Melayu pada saat itu. Sedangkan di Indonesia, perjalanan pengembangan bahasa Melayu dimulai sejak bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1947 ditetapkan terjadinya perubahan ejaan bahasa Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Ejaan Soewandi (Ejaan Republik), akan tetapi karena penetapan ejaan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, maka munculah ide untuk kembali melakukan perubahan ejaan.

Rentang tahun 1950-an telah terjadi perkembangan penting dalam bidang kebahasaan. LBB (Lembaga Bahasa dan Budaya) yang didirikan tahun 1952 yang saat itu menggantikan Balai Bahasa (tahun 1948 sampai 1952) sangat aktif melancarkan sebuah agenda mengembangkan bahasa Indonesia. Melalui sebuah penyusunan tata bahasa, penyusunan kamus bahasa daerah dan bahasa Indonesia,

⁴² Setyadi Sulaiman, *"RUJUK" Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 55.

neologisme ilmiah, ternyata LBB juga terus melakukan upaya memperkuat agenda pengembangan bahasa Indonesia melalui sebuah majalah yang berjudul “*Bahasa dan Budaya*” pada tahun 1952 sampai tahun 1964. Disisi lain, Ejaan Soewandi yang semula ditetapkan kemudian diganti karena menuai reaksi dari masyarakat. Kemudian setelah munculnya keputusan kongres, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh panitia ejaan yang saat itu sudah diangkat oleh pemerintah, pada tahun 1957 panitia tersebut menyelesaikan tugasnya yang berupa konsep sistem ejaan yang dikenal dengan sebutan *Ejaan Pembaharuan*. Ketuanya adalah Prijono (saat itu menjabat pula sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia). Akan tetapi sayangnya konsep ejaan tersebut juga tidak bisa digunakan karena sudah munculnya perkembangan baru dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1954 dilaksanakanlah Kongres Bahasa Indonesia II di kota Medan. Dalam kongres tersebut juga hadir para utusan dari Persekutuan Tanah Melayu, lalu mereka juga mengadakan sebuah kongres bahasa yang dilaksanakan di Singapura pada tahun 1956. Dalam kongres yang dilakukan di Singapura dihasilkan sebuah keputusan untuk menyatukan Ejaan Bahasa Melayu dengan Ejaan Bahasa Indonesia.⁴³

Perkembangan berikutnya yaitu disetujuinya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia yang saat itu Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri yaitu H. Djuanda Kartawidjaja, sedangkan Persekutuan Tanah Melayu diwakili oleh Timbalan Perdana Menteri yaitu Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein.

⁴³ Lukman Ali, *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 7-8

Kemudian dibentuklah sebuah panitia Bersama Indonesia-Melayu yang akhirnya menghasilkan sebuah konsep ejaan bersama yang dinamakan *Ejaan Melindo*. Panitia ejaan ini ketuanya adalah Slamet Muljana (pihak Indonesia) serta Syed Nassir bin Ismail (pihak Malaysia). Kedua pemerintah pada akhirnya sepakat untuk peresmian *Ejaan Melindo* paling lambat bulan Januari tahun 1962. Sayangnya pada saat itu kesepakatan antara keduanya belum sempat terwujud dikarenakan terjadinya konfrontasi.

Pada tahun 1959 LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan) merupakan sebuah Lembaga baru yang menggantikan peran LBB. Kehadiran LBK pada masa itu semakin memperkuat perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat itu muncul para tokoh yang giat mengembangkan bahasa Indonesia sehingga mengalami peningkatan yang pesat, diantaranya yaitu Slamet Mulyana, Lukman Ali, Basuki Suhardi, S.W Rudjiati Mulyadi, A.M Moeliono, Husein Widjajakusumah dan sebagainya. Dampak yang bisa dirasakan bukan hanya dalam hal penguatan bahasa saja melainkan lebih dari itu perkembangan dalam bidang bahasa pun dapat berjalan. Sejak saat itulah usaha-usaha untuk menjalin kerjasama dalam bidang bahasa khususnya bagi negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu seperti Persekutuan Tanah Melayu semakin digiatkan.

Pada 17 April tahun 1959 dilakukanlah penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia) sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama kebahasaan. Lalu diadakanlah sebuah pertemuan antara Tim Ahli Bahasa Indonesia yang diwakili oleh Slamet Mulyana dengan Jawatankuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu

yang diwakili oleh Tun Syed Nassir dengan agenda yang utama yaitu membicarakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dunia kebahasaan diantara keduanya.⁴⁴ Dalam pertemuan yang berlangsung selama 4 hari para ahli bahasa dari kedua negara menginginkan adanya sistem tulisan serta ejaan bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu bahasa. Adanya keinginan tersebut akhirnya mampu mendorong para ahli bahasa untuk merintis sebuah kerjasama dalam membakukan serta menyamakan ejaan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Hingga akhirnya dihasilkanlah sebuah konsep ejaan bersama yang dinamakan *Ejaan Melayu-Indonesia (Ejaan Melindo)*. *Ejaan Melindo* ini sudah efektif digunakan oleh pihak Indonesia sejak tahun 1961 bahkan pada saat terjadinya konfrontasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu sudah menerbitkan sebuah buku petunjuk yang menjelaskan tentang *Ejaan Melindo*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak setuju terkait konsep Melindo serta dilakukannya upaya untuk memperkuat perubahan konsep sistem ejaan yang lebih baik lagi, maka LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan) pada 7 Mei tahun 1966 membentuk suatu panitia dimana ketuanya adalah Anton M. Moeliono, Lembaga ini mengusulkan sebuah konsep baru sebagai pengganti konsep Melindo tersebut. Lalu tanggal 7 September tahun 1966 diadakan kembali pertemuan diantara kedua negara tersebut, hingga dihasilkanlah sebuah kesepakatan untuk mewujudkan konsep sistem ejaan baru yang lebih praktis dan ilmiah.⁴⁵ Konsep LBK yang baru ini tidak menggunakan huruf-huruf baru, panitia

⁴⁴ Setyadi Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 55-56.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

tersebut pada akhirnya disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan dikeluarkannya sebuah surat putusan No. 062/1967 pada 19 September tahun 1967. Pada saat itu Ketua (KOTI G V) Gabungan V Komando Operasi Tertinggi serta KOLAGA (Komando Mandala Siaga) membentuk sebuah tim ahli bahasa KOTI yang mana ketuanya adalah S.W. Rudjiati Mulyadi dan wakilnya adalah Anton M. Moeliono serta para anggotanya terdiri dari Lukman Ali, Basuki Suhardi, dan Djoko Kentjono.

Ketua Komando Operasi Tertinggi Gabungan V saat itu membawa rancangan konsep aturan ejaan baru Indonesia sebagai salah satu bahan untuk pertemuan dengan pihak Malaysia. Pada tanggal 27 Juni tahun 1967 di Kuala Lumpur terjadilah agenda pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya terdiri dari Jawatankuasa Bahasa Melayu (Malaysia), yaitu Syed Nasir bin Ismail, Abdul Samad Ismail, Kamaluddin Muhammad, Yunus Maris, serta Hasan Ahmad. Sedangkan dari pihak Indonesia diwakili oleh Tim Ahli Bahasa (KOTI), yaitu Rudjiati Mulyadi, Lukman Ali, Anton M. Moeliono, Djoko Kentjono, serta Basuki Suhardi. Pada saat itu Ejaan Melindo disepakati penggunaannya dan resmi ditandatangani oleh Rudjiati Mulyadi dari pihak Indonesia serta Tun Syed Nassir dari pihak Malaysia. Pada tahun selanjutnya agenda pertemuan kedua kembali diadakan, misi dalam agenda tersebut adalah memajukan aspek bidang kebahasaan serta mempererat hubungan relasi antara kedua negara.

Tanggal 23 Mei tahun 1972, Menteri Pelajaran Malaysia berkunjung ke Jakarta dengan membawa agenda tentang misi penguatan kebahasaan, hingga

akhirnya menghasilkan sebuah Persetujuan Bersama dalam rangka kerjasama bidang bahasa. Kemudian Persetujuan Bersama itu disahkan melalui sebuah penandatanganan *Komunike Bersama* oleh Menteri Pendidikan (Mashuri Shaleh) dengan Menteri Pelajaran (Encik Hussein Onn) di Jakarta. Sesuai dengan *Komunike Bersama*, bahwa terdapat 2 agenda penting yang salah satunya agenda tersebut akan menjadi fokus yang utama yaitu upaya mengembangkan bahasa nasional negara masing-masing yang berkaitan dengan istilah, ejaan, serta tata bahasa. Dalam misi mengembangkan bahasa nasional, maka kedua pemerintah dari negara masing-masing sepakat untuk melaksanakan beberapa hal, diantaranya melanjutkan agenda yang pernah dilakukan dalam pertemuan tanggal 27 Juni tahun 1967 yang membahas tentang konsep ejaan yang disempurnakan. Lalu mengumumkan serta meresmikan pemberlakuan konsep ejaan tersebut, selanjutnya membentuk sebuah panitia tetap bersama yang bertugas mengembangkan bahasa nasional negara masing-masing yang nantinya akan mengadakan pertemuan secara rutin dan bergiliran paling lambat tanggal 31 Desember tahun 1972.

Kerjasama dalam bidang bahasa antara Indonesia dengan Malaysia akhirnya resmi diakui pada tingkat pemerintahan negara, hal tersebut karena telah dilakukannya pertemuan serta penandatanganan terkait pernyataan bersama. Kemudian sejak saat itu pihak Indonesia dan Malaysia makin giat melakukan upaya kerjasama kebahasaan. Disamping itu, pihak Indonesia juga tengah memperkenalkan konsep ejaan baru kepada masyarakat. Saat itu Mashuri telah menyusun sebuah strategi yang terencana dan lebih rinci. Beliau menugaskan

para pakar bahasa serta petugas lain untuk melaksanakan berbagai usaha dalam menyebarkan konsep ejaan tersebut.

Hal utama yang harus dilaksanakan pada saat itu adalah menerangkan secara luas pada masyarakat terkait pemikiran dalam menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berdasar pada bahasa Melayu sama seperti bahasa Malaysia yang berdasar pada bahasa Melayu, yang mana kedua bahasa tersebut mampu menyatukan bangsa yang ada di Kawasan Asia tenggara. Tugas pertama dalam menjalankan hubungan kerjasama ini adalah memanggil para ahli bahasa untuk kembali menggiatkan usaha dalam mengenalkan konsep ejaan baru dengan cara mengadakan sebuah diskusi, seminar ataupun ceramah. Terdapat 3 bidang yang menjadi prioritas dalam standarisasi tersebut yaitu tata bahasa, ejaan serta peristilahan. Mashuri bersama dengan ahli bahasa dan ahli bidang lainnya terus menyebarluaskan penjelasan terkait pelaksanaan EYD (Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan) kepada masyarakat.

Terdapat 7 kelompok yang saat itu bekerjasama dengan kelompok teknis bahasa. Kelompok ini bertugas menyiapkan sebuah konsep EYD sebagai bahan pokok untuk nantinya disampaikan pada masyarakat dengan berdasar pada konsep ejaan LBK yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Akhirnya kegiatan panitia yang melaksanakan EYD dikukuhkan melalui surat keputusan no. 03/A.I/1972 pada tanggal 20 Mei tahun 1972. Kelompok nonteknis bahasa terdiri dari perencanaan, penerangan, sekretaris, logistik, serta hubungan

husus.⁴⁶ Tokoh yang termasuk dalam kelompok bahasa diantaranya yaitu Lukman Ali (ketua), Djoko Kentjono, Rudjiati Mulyadi, Basuki Suhardi, S. Effendi, Harimurti Kridalaksana dan Dahnil Adnani (anggota).

Pada saat EYD telah diresmikan oleh presiden, maka dalam masa tugas panitia EYD, saat itu juga diadakan pertemuan antara pihak Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan sebuah kesepakatan (*Komunike Bersama*) yang isinya memerlukan sebuah kerjasama dalam bidang kebahasaan serta pendidikan antara negara Indonesia dan negara Malaysia.⁴⁷ Lalu terkait masalah ejaan, pada 26 Juni tahun 1967 disepakatilah pelaksanaan ejaan yang sudah disempurnakan oleh kedua negara. Adanya *Komunike Bersama* telah mendorong terwujudnya Ejaan Bersama Bahasa Indonesia atau Malaysia yang pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Setelah EYD resmi ditetapkan, maka didirikanlah sebuah kerjasama bahasa Indonesia serta Malaysia yang dinamakan MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia).

Kerangka kerjasama hubungan antara Indonesia dengan Malaysia terlihat jelas dalam bidang bahasa. Sejak tahun 1970 sudah terjalin kerjasama yang erat antara Indonesia serta Malaysia yang dilakukan atas aspirasi untuk mengembalikan kejayaan bahasa Melayu di Nusantara. Kerjasama ini pada akhirnya menghasilkan pengumuman serentak terkait penggunaan ejaan gabungan Malaysia dan Indonesia di daerah Jakarta dan di Kuala Lumpur pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Koordinasi kerjasama bahasa ini kemudian

⁴⁶ Lukman Ali, *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 13-14.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

dilanjutkan melalui sebuah pembentukan Dewan Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) tahun 1972 dan kerjasama bahasa ini berlangsung sampai saat ini.⁴⁸

2.2 Pembentukan MBIM Tahun 1972

Pada 23 Mei tahun 1972 diadakan sebuah pertemuan diantara Mashuri Shaleh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan Encik Hussein Onn selaku Menteri Pelajaran negara Malaysia yang berlangsung di Jakarta, hal tersebut sebagai tindak lanjut untuk penguatan kerjasama dalam bidang bahasa secara hukum. Hasil dari pertemuan yang telah berlangsung itu adalah penandatanganan Persetujuan Bersama diantara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia terkait kerjasama bidang kebahasaan yang dinamakan “*Komunike Bersama*”.⁴⁹ Ada beberapa hal yang telah disetujui dalam naskah *Komunike Bersama* tersebut, diantaranya (1) mengembangkan bahasa kebangsaan negara masing-masing yang meliputi istilah, ejaan serta tata bahasa (2) melakukan berbagai upaya dan usaha yang sudah disepakati dalam perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 27 Juni tahun 1967 yaitu terkait Ejaan yang Disempurnakan (ejaan baru). Perjanjian tahun 1967 tentang cadangan ejaan baru yang sudah ditandatangani oleh Tun Syed Nasir bin Ismail (Ketua Jawatankuasa Ejaan Bahasa Melayu) beserta nyonya Rudjiati Mulyadi (Ketua dari Tim Ahli Bahasa) (3) kedua negara berencana untuk membentuk ketua tetap bahasa kebangsaan negara masing-masing paling lambat akhir tahun 1972.⁵⁰ Melihat

⁴⁸ Rohani Abdul Ghani & Zulhilmi Paidi, *op.cit.*, hlm. 241.

⁴⁹ Hasan Alwi, *Sosok Pokok Tokoh Mabbim*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 7.

⁵⁰ Dato Hj Jumaat bin dato Hj Mohd. Noor, “*Kerjasama Kebahasaan Sedikit Pengalaman dan Usaha Kerjasama dalam Mabbim*”, dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan*

terjadinya perkembangan cukup baik dikedua negara dalam bidang kebahasaan, maka sebagai sebuah lanjutan dari penandatanganan *Komunike Bersama*, akhirnya pihak Indonesia serta Malaysia sepakat untuk mengadakan kembali sebuah pertemuan tanggal 20 sampai 22 Juni tahun 1972.

Adanya pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan penyempurnaan ejaan yang sudah digunakan dikedua negara yang disesuaikan dengan perkembangan dari negara masing-masing, melanjutkan agenda pertemuan yang berdasar pada persetujuan tentang ejaan bersama yang sudah disepakati 27 Juni tahun 1967 serta melakukan sebuah diskusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan bidang kebahasaan secara umum. Terdapat beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari pihak Indonesia ada Lukman Ali, Basuki Suhardi, Djoko Kentjono, S. Effendi serta Harimurti Kridalaksana. Sedangkan dari pihak Malaysia tokoh yang hadir pada saat itu adalah Abdul Rahman bin Arshad, Hasan Ahmad, Jalal Ahmad bin Abdullah serta Kamaluddin Muhammad.⁵¹ Sebagai sebuah tindak lanjut dari penandatanganan Persetujuan Bersama, maka pada 26 sampai 29 Desember tahun 1972 dilakukan persidangan pertama bidang bahasa yang berlangsung di Kuala Lumpur (Malaysia). Salah satu keputusan penting dalam persidangan tersebut adalah dibentuk serta diresmikannya sebuah wadah kerjasama dalam bidang kebahasaan antara negara Indonesia dan negara Malaysia yang diberi nama MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia pada 29 Desember tahun 1972.

Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 131.

⁵¹ Setyadi Sulaiman, *"RUJUK" Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 60.

Anggota tetap Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia terdiri dari PKSKIM (Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia) serta ada JKTBM (Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia). Dalam persidangan pertama MBIM, tiap negara harus mengirimkan perwakilan baik yang berasal dari ahli bahasa atau ahli dalam bidang lain. Tokoh-tokoh perwakilan dari Malaysia yang hadir dalam persidangan pertama saat itu merupakan orang-orang yang tergabung dalam sebuah kelompok JKTBM, diantaranya yaitu Mohd. Ghazali Hj Abdul Rahman, Sujak Rahiman Hasan Ahmad, Asmah Haji Omar, Kamaluddin Muhammad, Abdul Hasan, Muhamad Yahaya, Jalal Ahmad Abdullah, Shaharir bin Mod. Zain, Awang Had Shalleh, Amat Juhari Moain, Noramly Muslim serta Abdul Rahman Arshad.

Tokoh-tokoh perwakilan dari Indonesia yang hadir dalam persidangan tersebut merupakan kelompok PPBI (Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia) yang terdiri dari Amran Halim (ketua), Anton M. Moeliono (wakil), Lukman Ali serta Harimurti Kridalaksana (sekertariat), Djoko Kentjono, Samsuri, Syarif Hidayatullah, S. Effendi, Muljanto Sumardi, Taufik Ismail, H. Johannes, Andi Hakim Nasution, Sjahrul Sjarif, Rudjiati Mulyadi, Basuki Suhardi, Hartono Ali Basah, D.H Assegaf dan anggota yang lainnya.⁵² Dalam persidangan terdapat beberapa agenda bahasan yang didiskusikan pada saat itu, hingga akhirnya disepakatilah adanya pembentukan sebuah majelis bersama dalam bidang kebahasaan antara pihak Indonesia serta Malaysia yang dinamakan MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) yang sudah resmi disepakati tepatnya pada

⁵² *Ibid.*, hlm. 60-61.

29 Desember tahun 1972. Hasil persidangan majelis yang pertama MBIM menyebutkan bahwasanya MBIM memiliki peranan utama sebagai berikut: (1) sebagai sebuah badan bersama yang nantinya akan rutin mengadakan berbagai pertemuan yang bertujuan untuk memikirkan, meneliti serta mendiskusikan berbagai hal bersama yang berkaitan dengan sistem peristilahan, ejaan, tata bahasa serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bidang kebahasaan diantara kedua negara; (2) Menyalurkan serta menampung berbagai bahan terkait bahasa dari kedua negara untuk kegunaan dan dikaji secara bersama-sama; (3) Menyerahkan bahan-bahan terkait bahasa kepada Menteri dari negara masing-masing untuk dipertimbangkan kembali serta diputuskan.⁵³

Persidangan 1-5 Majelis lebih memfokuskan terhadap penyusunan pedoman umum yang berkaitan dengan sistem peristilahan dan juga ejaan. Sedangkan pada sidang ke-6 yang dilaksanakan di Jakarta, Majelis sudah menerima serta melakukan pengesahan *terhadap Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan* ke dalam 2 versi yaitu versi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kemudian mulai dari persidangan ke-7 Majelis membicarakan terkait peristilahan dalam bidang ilmu. Kesepakatan awal yang ingin dicapai adalah peristilahan dalam 5 bidang ilmu yang meliputi bidang linguistik, pendidikan, sastra, pertanian dan perhutanan serta teknik sipil yang memang pada saat itu dibutuhkan penggunaannya untuk pendidikan dalam tingkat perguruan tinggi.⁵⁴ Untuk penentuan bidang ilmu tersebut sudah

⁵³ Dato Hj Jumaat bin dato Hj Mohd. Noor, *op.cit.*, hlm. 132.

⁵⁴ Hasan Alwi, *Sosok Pokok Tokoh Mabbim*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 7.

dilaksanakan pada persidangan sebelumnya serta berbagai bahannya pun sudah dibincangkan dalam 2x persidangan Majelis. Dalam setiap persidangan akan dilaksanakan pertukaran bahan-bahan dari kedua negara persidangan selanjutnya.

Pada persidangan ke-14 MBIM, terkait cara kerja dilakukan sebuah perubahan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang mana ditetapkan baha-bahan terkait peristilahan untuk jangka panjang yaitu selama 3 tahun. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dalam menyiapkan bahan-bahan serta para ahli yang nantinya akan terlibat. Kemudian pada 29 Maret sampai 3 April tahun 1982 dalam persidangan ke-18 yang dilaksanakan di Palembang (Indonesia) adalah waktu penting untuk kegiatan Majelis, dikarenakan dalam persidangan itu sudah disusun serta diputuskan terkait jadwal acara persidangan yang lebih terencana untuk membahas terkait peristilahan dalam bidang ilmu dasar. Dalam persidangan tersebut sudah disusun jadwal persidangan untuk 5 tahun kedepan. Terkait urutan pembahasannya disesuaikan dengan taksonomi dalam bidang ilmu yang sudah disetujui bersama. Oleh sebab itu, kedua pihak berharap agar seluruh subbidang ilmu dasar dalam jangka waktu tersebut dapat dibicarakan sampai tuntas.⁵⁵

Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia memiliki tanggung jawab untuk menyatukan serta membina bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ada diantara kedua negara. Upaya pembinaan dan penyatuan tersebut harus dilakukan guna kelancaran komunikasi baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, budaya, ekonomi ataupun politik khususnya dikalangan

⁵⁵ *Ibid.*,

negara-negara yang menjadi anggota MBIM.⁵⁶ Sejatinya bahasa itu menunjukkan sebuah bangsa yang sekaligus menjadi suatu identitas. Tentunya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu mempunyai bangsa serta para penuturnya sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut harus mampu memelihara dan melestarikannya. Disamping itu, para penutur juga tidak boleh menutup diri terhadap budaya yang lain termasuk salah satunya yaitu bahasa. Akan tetapi tidak boleh juga mengabaikan bahkan sampai melupakan budaya serta bahasanya sendiri. Dengan adanya sikap serta kesetiaan terhadap bahasa, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah modal untuk merintis kejayaan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dimasa yang akan datang. Untuk bisa mencapai cita-cita tersebut, maka adanya wadah kerjasama dalam bidang kebahasaan diantara negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu bisa menjadi sebuah langkah yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut dikemudian hari.⁵⁷

Langkah selanjutnya sesudah berhasil mengupayakan penyeragaman terkait sistem ejaan, maka MBIM selanjutnya melakukan berbagai usaha untuk fokus melakukan penyeragaman terkait sistem peristilahan dalam berbagai bidang ilmu alam yang meliputi fisika, biologi, kimia serta peristilahan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Sebelum dilakukannya penyeragaman sistem istilah, para ahli bahasa dari kedua negara terlebih dulu meneliti, mengkaji serta menyediakan sebuah buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu* pada tahun 1975 serta menyediakan buku *Panduan Penyusunan Kamus Istilah* tahun 1982.

⁵⁶ Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini bin Kasdan, *Telus, Konflik dan Legap Istilah Mabbim: Satu Kajian Morfosemantik*. *Jurnal Bahasa* Vol. 7, No. 8 (2007): 89-120. hlm. 90.

⁵⁷ Mohd Azurin Othman & Norati Bakar, *Prosiding Kongres Antarabangsa Bahasa dan Budaya Jilid II*. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011, hlm. 132-133.

Besarnya jasa dan bakti yang telah disumbangkan oleh para ahli bahasa dari Indonesia serta Malaysia yang sudah merintis dan mengembangkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dengan cara menghasilkan sebuah buku *Pedoman Sistem Ejaan Baru* serta buku *Pedoman Pembentukan Istilah* untuk bisa menyeragamkan serta menyatukan bahasa serumpun. Karena pada umumnya perkembangan bahasa itu terjadi secara alamiah, akan tetapi bisa juga perkembangan tersebut terjadi dengan cara direncanakan.⁵⁸ Ada beberapa tokoh yang namanya tercatat dalam perjalanan sejarah serta mendapatkan penghargaan atas kerja keras dan sumbangan baktinya dalam bidang bahasa, diantaranya yaitu Prof. Dr. Anton M. Moeliono serta Prof. Dr. Amran Halim (Indonesia), Dato Dr. Asmah Haji Omar serta Dato Haji Hassan Ahmad (Malaysia).

2.2.1 Piagam MBIM

Pada saat Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia telah resmi didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 1972, maka sebagai bentuk petunjuk dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibuatlah sebuah Piagam MBIM sebagai garis panduan dalam kegiatan bahasa yang disebut Piagam Kerjasama Kebahasaan yang sudah ditandatangani oleh Dr. Amran Halim selaku perwakilan PPBI (Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia) serta Datuk Haji Sujak bin Rahiman selaku perwakilan JKTBM (Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia).⁵⁹ Adapun sebagai bentuk pedoman penerapan ejaan baru tersebut, maka disusun serta disepakatilah oleh kedua negara terkait buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa*

⁵⁸ Dendy Sugono, *Peranan Bahasa dan Sastra Indonesia/Melayu dalam Pembinaan Masyarakat Madani*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003, hlm. 106.

⁵⁹ Mahsun, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu: Perkembangan Hubungan dan Masa depannya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2013, hlm. 17.

Indonesia yang Disempurnakan (terdapat edisi yang pertama tahun 1975, edisi yang kedua tahun 1989, serta edisi yang ketiga tahun 2008) untuk diterapkan di negara-negara yang menjadi anggota MBIM, salah satunya adalah Indonesia.⁶⁰

Piagam kerjasama tersebut didalamnya berisikan beberapa hal, yaitu Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia harus beranggotakan para PPBI serta JKTBM (Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia) dan juga (Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia). Kemudian diputuskan juga terkait persidangan yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, untuk tempat persidangannya dilakukan secara bergiliran diantara negara Indonesia dan negara Malaysia. Setiap persidangan MBIM harus dihadiri oleh setiap perwakilan dari negara masing-masing yang sudah mendapatkan tugas dari Menteri bidang bahasa yang ada di negaranya masing-masing. Selain itu, di dalam Piagam Kerjasama Kebahasaan juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan tata kerja dari MBIM, khususnya dalam poin ketujuh dijelaskan bahwa tugas dari Majelis Bahasa itu dilakukan dengan cara tukar menukar bahan, sanggar kerja, serta adanya persetujuan bersama.

Untuk kegiatan tukar-menukar bahan, biasanya agenda ini akan dilaksanakan melalui proses surat menyurat antara pihak Indonesia dan Malaysia. Terkait bahan-bahan yang akan diberikan dan juga diterima, biasanya bahan tersebut boleh merupakan bahan yang diminta ataupun bahan yang tidak diminta oleh kedua pihak antara Indonesia serta Malaysia. Sedangkan untuk agenda

⁶⁰ Dendy Sugono, "*Konteks Kebahasaan dalam Hubungan Indonesia-Malaysia*", dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 123.

sanggar kerja harus dihadiri oleh para anggota yang bergabung dengan Majelis Bahasa, agenda tersebut diadakan dengan tujuan untuk melakukan diskusi serta saling tukar pikiran terkait permasalahan dalam dunia bahasa. Agenda sanggar kerja juga diarahkan agar bisa mencapai sebuah pendekatan diantara kedua negara, sedangkan untuk keputusan dari agenda sanggar kerja ini, nantinya hanya akan diumumkan sesudah mendapatkan izin dari Menteri negara masing-masing. Berdasar pada Piagam Kerjasama Bahasa yang sudah dibuat oleh MBIM, untuk selanjutnya akan dilakukan program-program kerja yang lebih diarahkan untuk mengupayakan tercapainya titik temu antara pihak Indonesia dengan pihak Malaysia terkait sistem peristilahan serta ejaan. Berbagai usaha tersebut juga ditunjang oleh berbagai pertemuan yang diadakan oleh keduanya secara rutin yang dinamakan Sidang Majelis (akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun secara bergiliran di Indonesia dan juga di Malaysia).⁶¹

Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia sesudah berhasil menangani sistem ejaan, selanjutnya melakukan penggarapan terkait pengembangan sistem peristilahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai suatu usaha untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang modern. Istilah adalah bagian khusus dalam pengembangan sebuah bahasa, khususnya dalam tahapan perencanaan bahasa dalam bidang kosakata. Melalui istilah, setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah bidang akan bisa melakukan komunikasi yang baik dengan para koleganya.⁶² Pembentukan istilah juga sangat penting untuk

⁶¹ Setyadi Sulaiman, *"RUJUK" Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 62-63.

⁶² Wiwiek Dwi Astuti, *Sikap Bahasa Mahasiswa dan Dosen Terhadap Istilah Terjemahan dan Istilah Serapan Bidang Ekonomi Hasil MABBIM*. *Humaniora* Vol.19, No. 1 (2007): 62-72, hlm. 63.

dilakukan dalam memartabatkan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, karena istilah adalah gabungan dari kata yang secara jelas menerangkan arti dari sebuah makna, konsep, ciri atau keadaan dalam suatu bidang tertentu.⁶³ Prosedur dalam pembentukan istilah adalah suatu proses yang rumit serta biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Pembentukan istilah biasanya akan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap pengumpulan, penggubalan, pengesahan, penyelarasan sampai penerbitan. Dalam prosesnya dibutuhkan peran dari para ahli bahasa dan para ahli diberbagai bidang yang memiliki komitmen serta kemahiran dalam aspek kebahasaan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut secara kelompok terkait pembentukan istilah.⁶⁴

Langkah awal dari kegiatan sistem peristilahan tersebut ditujukan terhadap pembahasan terkait buku pedoman yang di dalamnya memuat tentang prosedur atau tata cara pengembangan istilah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Maka disusun serta disetujuiilah panduan pembentukan peristilahan baru yang dinamakan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (diterbitkan dalam edisi pertama pada tahun 1975, edisi kedua tahun 1989, edisi ketiga tahun 2005). Pada saat pembahasan terkait pengembangan dalam bidang peristilahan menjadi prioritas utama untuk bisa memajukan bahasa kebangsaan.

Bersandar pada panduan tata kerja yang sudah dibuat, maka MBIM beserta para ahli bidang bahasa dan para ahli dibidang lainnya saling bekerjasama dan

⁶³ Saddiah, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006, hlm. 1.

⁶⁴ Asrul azuan Mat Deha, Nor Azuwan Yakoob, Jama'yah Zakaria, *Gerak Kerja '5P' Pembentukan Istilah Bahasa Melayu*. Universiti Putra Malaysia, *International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL)* Vol. 1 (2014): 77-86, hlm. 78.

membulatkan tekad untuk terus melanjutkan kerjasama bidang bahasa dan melaksanakan persidangan berikutnya. Dimulai dari persidangan pertama sampai persidangan keenam MBIM sudah membicarakan terkait berbagai hal yang berkaitan erat dengan persoalan dalam menentukan pedoman umum ejaan serta pedoman umum pembentukan istilah. Hingga akhirnya diputuskanlah beberapa ketetapan serta hasil persidangan tertentu dalam MBIM. Diantaranya yaitu dalam persidangan ke-5 MBIM yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Johor Bahru (Malaysia), diputuskanlah buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu* sudah disetujui oleh kedua negara untuk diterbitkan. Dalam persidangan ke-7 yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kuala Lumpur (Malaysia), didiskusikan terkait peristilahan dalam 5 bidang dan subbidang yang disesuaikan dengan keperluan berbagai istilah untuk digunakan dalam tingkat perguruan tinggi.

Pada persidangan ke-14 MBIM yang dilaksanakan pada tahun 1980 di kota Bali, sudah dibuatnya sebuah ketetapan terkait entri Kamus Peristilahan dalam Bidang Sains (matematika, biologi, kimia, dan fisika). Dimana setiap istilah dalam bidang tersebut dibatasi hanya sampai 1000 entri). Dari setiap persidangan yang sudah dilaksanakan, maka pada akhirnya dibuatlah sebuah penetapan peristilahan yang dibagi menjadi 5 kategori. Dalam persidangan ke-18 yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Palembang, pemilihan terkait 5 kategori disusun.

- a. Kategori A: Istilah yang disetujui sama semuanya, yaitu kedua pihak menyetujui istilah yang dikemukakan itu sama baik dari segi ejaan ataupun imbuhan.

- b. Kategori B: Istilah yang disetujui sama tetapi ada yang berbeda sebagian baik dari segi ejaan atau morfologinya.
- c. Kategori C: Istilah yang disetujui memiliki perbedaan seluruhnya.
- d. Kategori D: Istilah yang disetujui untuk ditangguhkan, kedua negara setuju istilah tersebut akan ditangguhkan kembali dalam pembicaraan dikarenakan beberapa hal.
- e. Kategori E: Istilah yang disetujui untuk digugurkan, kedua negara setuju untuk tidak menggunakan istilah tersebut.⁶⁵

Di Indonesia keanggotaan dari Majelis tersebut dinamakan PPBI (Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia), sedangkan di Malaysia dinamakan dengan JKTBM (Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia) yang berada dibawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seiring berjalannya waktu, PPBI ini berubah nama menjadi Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia yang ada dibawah naungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (akan tetapi sekarang dinamakan Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional) sebagai Lembaga pengelola Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia yang ada di Indonesia. Untuk meluaskan kembali jangkauan untuk keanggotaan yang baru, maka dalam setiap persidangan MBIM akan diundang negara-negara lain yang menggunakan bahasa Melayu ke dalam persidangan, seperti negara Singapura serta Brunei Darussalam yang saat itu diundang sebagai negara pemerhati dalam persidangan MBIM.⁶⁶

⁶⁵ Dato Hj Jumaat bin dato Hj Mohd. Noor, “*Kerjasama Kebahasaan Sedikit Pengalaman dan Usaha Kerjasama dalam Mabbim*”, dalam Musni Umar dan Pudientia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011, hlm. 132-134.

⁶⁶ Dendy Sugono, *Loc.Cit.*

Lahirnya Piagam MBIM telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Melayu seperti Brunei Darussalam dan juga Singapura untuk ikut bergabung dalam wadah kerjasama bidang kebahasaan yang saat itu baru saja dibentuk. Pada akhirnya sejak tahun 1980, negara Singapura serta Brunei Darussalam menjadi negara pemerhati resmi dalam tiap persidangan MBIM yang selalu dilaksanakan secara bergiliran antara kedua negara tersebut.⁶⁷ Menurut perjalanan sejarahnya, pembentukan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) ini banyak diprakarsai oleh ide dari para tokoh ahli bahasa serta para akademisi yang berasal dari Indonesia dan juga Malaysia.

Dalam kelembagaan MBIM terdapat 2 macam badan, yaitu Kelompok Pakar dan Kelompok Eksekutif serta terdapat 2 macam persidangan, diantaranya yaitu Sidang Majelis dengan Sidang Pakar.⁶⁸ Kerjasama dalam bidang bahasa (MBIM) pada saat itu menjadi salah satu media yang efektif menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara Indonesia serta Malaysia serta merupakan sebuah kerjasama yang unik yang tidak ada di wilayah lain. Mulai dari tahun 1972 sampai tahun 1985, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ini sudah melaksanakan persidangan sebanyak 24 kali. Setiap persidangan akan dilakukan secara bergiliran diantara kedua negara tersebut. Persidangan ke-24 MBIM menjadi sidang terakhir dalam masa kepengurusan MBIM.

⁶⁷ Mahsun, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu: Perkembangan Hubungan dan Masa Depan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2013, hlm. 17.

⁶⁸ Setyadi Sulaiman, *"RUJUK" Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 66-73.

Tabel 2.1
Waktu serta Tempat Berlangsungnya Sidang MBIM Pada Tahun 1972-1985⁶⁹

Waktu	Lokasi	Persidangan
Tanggal 26 - 29 Desember 1972	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-1
Tanggal 3 – 5 Agustus 1973	Bogor (Indonesia)	Ke-2
Tanggal 3 – 5 Desember 1973	Pulau Pinang (Malaysia)	Ke-3
Tanggal 24 – 27 Juni 1974	Semarang (Indonesia)	Ke-4
Tanggal 2 – 5 Desember 1974	Johor Bahru (Malaysia)	Ke-5
Tanggal 14 – 18 Juni 1975	Jakarta (Indonesia)	Ke-6
Tanggal 4 – 9 Februari 1976	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-7
Tanggal 9 – 13 Agustus 1976	Bogor (Indonesia)	Ke-8
Tanggal 22 – 26 Februari 1977	Kuantan (Malaysia)	Ke-9
Tanggal 2 – 8 Oktober 1977	Jakarta (Indonesia)	Ke-10
Tanggal 13 – 18 Maret 1978	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-11
Tanggal 14 – 20 November 1978	Jakarta (Indonesia)	Ke-12
Tanggal 3 – 7 September 1979	Malaka (Malaysia)	Ke-13
Tanggal 10 – 14 Maret 1980	Denpasar, Bali (Indonesia)	Ke-14
Tanggal 2 – 6 September 1980	Kota Kinabalu (Malaysia)	Ke-15
Tanggal 15 – 20 Maret 1981	Yogyakarta (Indonesia)	Ke-16
Tanggal 24 – 29 Agustus 1981	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-17
Tanggal 29 Maret – 3 April 1982	Palembang (Indonesia)	Ke-18
Tanggal 8 – 12 November 1982	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-19
Tanggal 25 – 30 Juli 1983	Jakarta (Indonesia)	Ke-20
Tanggal 16 – 20 April 1984	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-21
Tanggal 20 Oktober – 2 November 1984	Jakarta (Indonesia)	Ke-22
Tanggal 25 – 29 Maret 1985	Kuala Lumpur (Malaysia)	Ke-23
Tanggal 4 – 8 November 1985	Jakarta (Indonesia)	Ke-24

⁶⁹ Hasan Alwi, *Sosok Pokok Tokoh Mabbim*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 224.

Sumber: Hasan Alwi, Sosok Pokok Tokoh MABBIM. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm. 224.

2.2.2 Tahapan Kerjasama MBIM

Melihat perjalanan sejarahnya, dalam proses pembentukan MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) harus melewati serangkaian proses dan juga tahapan, diantaranya yaitu tahapan perencanaan serta tahapan pelaksanaan. Tahapan perencanaan merupakan sebuah tahapan mula-mula yang bisa memungkinkan sampai terbentuknya MBIM. Dalam tahapan perencanaan ini berkaitan dengan keterlibatan para tokoh baik itu berasal dari negara Indonesia ataupun negara Malaysia. Pada awalnya, tokoh tersebut mengadakan pertemuan dan mulai berdiskusi terkait isu-isu tentang kebahasaan, biasanya mereka ini sudah saling mengenal sejak lama dikarenakan mereka pernah belajar di universitas yang sama atau memang sudah menjalin persahabatan sejak dulu.

Dalam proses perkembangannya, dari serangkaian pertemuan informal yang sudah mereka lakukan dengan kemampuannya masing-masing, pada akhirnya menjadi sebuah penghubung yang menjembatani terjadinya sebuah pertemuan formal dalam tingkatan negara. Serangkaian proses inilah yang disebut tahapan perencanaan, adanya pertemuan yang jangkauannya lebih luas yang kemudian berdasar pada kebijakan pemerintah dari negara masing-masing. Dalam tahapan ini, mulai dilakukan pertemuan informal oleh perwakilan dari negara Indonesia dan negara Malaysia yang dimulai tahun 1967 sampai tahun 1972. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam tahapan perencanaan ini diantaranya adalah Lukman Ali, Djoko Kentjono, harimurti Kridalaksana, serta Hasan Ahmad (dari Malaysia).

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, tahapan ini dimulai sejak Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia resmi didirikan serta diakui oleh kedua belah pihak pada bulan Desember tahun 1972. Tahapan pelaksanaan ini dimulai dari kesepakatan kedua negara yang ingin melanjutkan pertemuan awal yang bersifat formal serta berdasar pada kebijakan kedua negara. Para tokoh yang hadir dalam tahapan pelaksanaan ini pada umumnya memang telah terlibat dan berperan aktifnya sejak tahapan perencanaan. Tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam tahapan pelaksanaan ini diantaranya ada yang berasal dari pihak Indonesia yaitu Amran Halim, Anton M. Moeliono, M. Mulyono Purbo Hadiwidjojo, Liek Wilardjo, Herman Johannes, Mien A Rifai, dan Andi Hakim Nasution. Sedangkan tokoh dari pihak Malaysia yang terlibat dalam tahapan ini adalah Amat Juhari Moain, Abdullah Hasan, Asmah Haji Omar, Awang had Salleh, Shahrir, dan Muhamad Yahaya.

Dalam kelembagaan MBIM terdapat 2 macam badan, yaitu Kelompok Pakar dan Kelompok Eksekutif serta terdapat 2 macam persidangan, diantaranya yaitu Sidang Majelis dengan Sidang Pakar.⁷⁰ Kerjasama dalam bidang bahasa (MBIM) pada saat itu menjadi salah satu media yang efektif menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara Indonesia serta Malaysia serta merupakan sebuah kerjasama yang unik yang tidak ada di wilayah lain. Mulai dari tahun 1972 sampai tahun 1985, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ini sudah melaksanakan persidangan sebanyak 24 kali. Setiap persidangan akan dilakukan secara

⁷⁰ Setyadi Sulaiman, *"RUJUK" Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 66-73.

bergiliran diantara kedua negara tersebut. Persidangan ke-24 MBIM menjadi sidang terakhir dalam masa kepengurusan MBIM.

Pada tanggal 4 November tahun 1985, negara Brunei Darussalam menyatakan bergabung menjadi anggota tetap kerjasama tersebut.⁷¹ Dengan bergabungnya Brunei Darussalam menjadi anggota Majelis, maka MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) akhirnya berubah nama menjadi MABBIM (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia).⁷² Bergabungnya Brunei Darussalam membuat kerjasama bidang bahasa menjadi lebih kukuh. Kerjasama ini juga tetap memiliki fungsi yaitu merancang serta menyelaraskan perkembangan bahasa Melayu di negara Indonesia, Malaysia serta Brunei Darussalam. Dengan adanya penyelarasan istilah melaui Majelis Bahasa (MBIM) merupakan sebuah cara untuk mewujudkan istilah yang nantinya bisa menepati pendekatan untuk semua acuan dalam berbagai bidang ilmu agar mudah dipahami oleh para penutur baik dari negara Indonesia maupun dari negara Malaysia.⁷³

⁷¹ Mahsun, *op.cit.*, hlm. 18.

⁷² Rudi Wahyu Nugroho, *Pemanfaatan Penerapan Bahasa Asing Sebagai Penguat Literasi Bahasa Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 5.

⁷³ Dendy Sugono, *Meretas Batas Menjempt Masa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 109.